

**Rekomendasi untuk Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pekalongan Tahun 2025-2029
dari Perspektif Tata Kelola Banjir dan Ketahanan
Iklim di Kabupaten Pekalongan**

Zurich Flood Resilience Alliance Programme,
Mercy Corps Indonesia

Daftar Isi

<i>Daftar Isi</i>	2
<i>Latar Belakang:</i>	3
<i>Akar Masalah Banjir di Kabupaten Pekalongan</i>	3
<i>Analisis Gap Kebijakan</i>	5
<i>Rekomendasi: Masukan bagi Draft RPJMD Kabupaten Pekalongan</i>	10
Rekomendasi untuk transformasi pengelolaan bencana dan adaptasi perubahan iklim	10
Rekomendasi untuk Pengelolaan Sumberdaya Air Terintegrasi (IWRM).....	11
Rekomendasi untuk pengelolaan aset terdampak banjir dan genangan.....	13
Rekomendasi untuk pembangunan masyarakat berketahanan	14
<i>Referensi</i>	17

Latar Belakang:

Akar Masalah Banjir di Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pekalongan saat ini menjadi salah satu wilayah yang menjadi salah satu rujukan baik yang banyak dibahas dalam diskusi tata kelola banjir di berbagai level, provinsi maupun nasionalⁱ. Hal tersebut salah satunya karena Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah membuat dan menunjukkan komitmen-komitmen yang cukup baik dalam merespon risiko dan dampak banjir. Beberapa di antaranya adalah upaya untuk transformasi pengelolaan sumber daya air bersih yang ditunjukkan dengan sudah dilaksanakannya kajian kelayakan awal untuk Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang (SPAMReg Petanglong)ⁱⁱ serta arahan untuk mempersiapkan rencana transformasi penyediaan air bersih dari air tanah ke air permukaanⁱⁱⁱ. Selain itu, praktik baik juga terlihat dalam upaya untuk mempersiapkan perumahan bagi sekitar 100 keluarga terdampak perpindahan pesisir atau *coastal displacement* akibat genangan pesisir permanen di Dukuh Simonet, Kabupaten Pekalongan^{iv}. Tidak hanya itu, setelah dibangunnya Tanggul Pesisir dari Pemerintah Pusat dan dana APBN pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga telah melakukan berbagai inisiatif bersama dengan aktor-aktor pembangunan non pemerintah untuk penyelamatan kawasan rawan banjir seperti Bintari, Water.org, Percik, Relung, dan berbagai lembaga riset lainnya.

Bagaimanapun, tantangan lingkungan yang dihadapi saat ini masih terus ada, dan semakin meningkat seiring juga dengan perkembangan wilayah dan dinamika perubahan iklim yang sedang terjadi. Pada awal tahun 2025, banjir bandang dan longsor terjadi di Kecamatan Petungkriyono, wilayah hulu dari Kabupaten Pekalongan. Korban dari kejadian ini setidaknya 20 korban jiwa serta 14 orang mengalami luka ringan^v. Banjir juga terjadi di wilayah hilir atau pesisir. Terdapat setidaknya empat desa, Kedungwuni, Wiradesa, Wonokerto dan Tirto, yang mengalami banjir di awal tahun ini meskipun di sisi lain desa-desa tersebut sudah sering mengalami banjir pesisir^{vi}.



Banjir dan Longsor Terjang Pekalongan, Jalur Petungkriyono-Doro Putus (Januari 2025)

Foto dari tim Mercy Corps Indonesia

Proses pembangunan dan penurunan kualitas lingkungan yang terjadi dalam jangka panjang di Kabupaten Pekalongan mempengaruhi peningkatan risiko banjir baik di wilayah hulu maupun hilir. Pada dasarnya, Kabupaten Pekalongan memiliki kondisi geologis yang rentan terhadap bencana seperti tanah longsor. Aktivitas manusia, seperti penggalian dan pembangunan di area rawan, turut meningkatkan kerentanan terhadap bencana tersebut^{vii}. Aktivitas seperti penebangan hutan untuk keperluan pertanian dan pertambangan telah mengurangi tutupan vegetasi di daerah hulu. Deforestasi ini mengakibatkan penurunan kemampuan tanah dalam menyerap air, sehingga meningkatkan risiko erosi dan tanah longsor^{viii}. Tidak hanya itu, penggunaan air tanah yang berlebihan di wilayah pesisir menyebabkan penurunan muka tanah^{ix}.

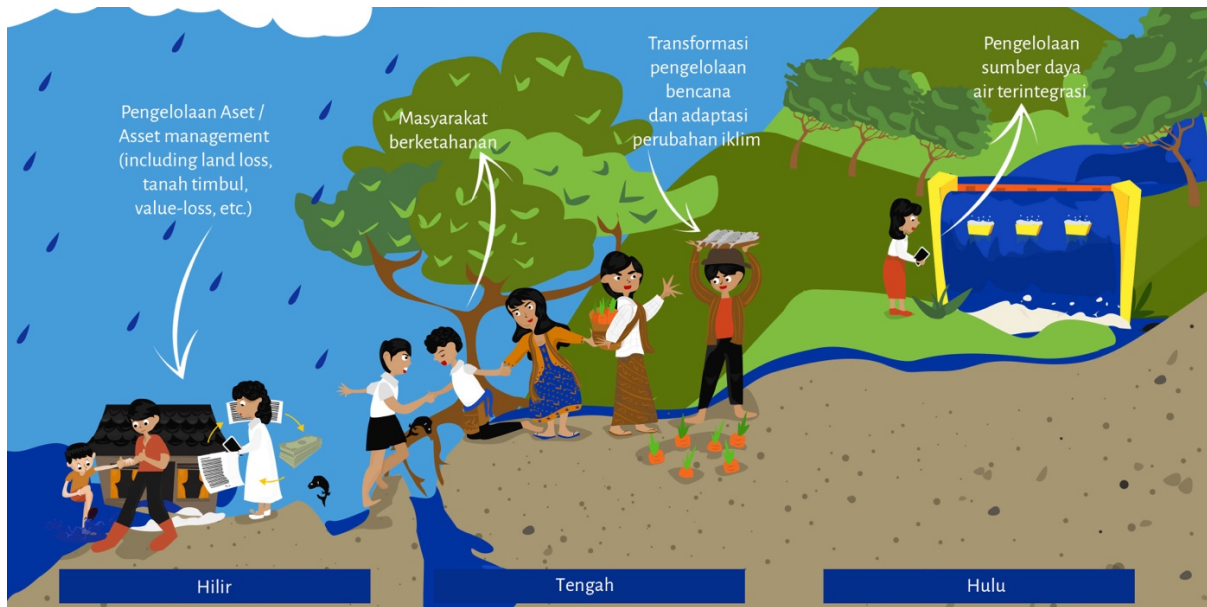
Kondisi perubahan lingkungan global juga memperparah risiko banjir rob di daerah pesisir Kabupaten Pekalongan. Perubahan iklim global telah menyebabkan peningkatan intensitas hujan ekstrem di Kabupaten Pekalongan. Curah hujan yang tinggi ini meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor, terutama selama musim hujan yang

berlangsung dari Oktober hingga Maret^x.

Kondisi ini akan semakin parah jika tidak ada intervensi kebijakan yang diambil. Estimasi penurunan permukaan tanah hingga 0,5-1 meter pada 10 tahun yang akan datang, meningkatkan wilayah terdampak banjir hingga 3,7 kali lipat di wilayah utara Pulau Jawa^{xi}. Di Pekalongan Raya, Mercy Corps Indonesia^{xii} mengestimasi bahwa risiko banjir bisa meningkat hingga hampir 2x lipat pada tahun 2035 dibandingkan tahun 2020, serta risiko banjir permanen di beberapa desa/kelurahan^{xiii}. Hal tersebut dapat memberikan dampak kepada 24 desa/kelurahan pada tahun 2020 dan diestimasi pada tahun 2035 akan meningkat hingga 42 desa/kelurahan yang memiliki risiko banjir sangat tinggi dengan estimasi luas genangan mencapai 5.700 ha^{xiv}. Kerugian ekonomi akibat peningkatan risiko ini diperkirakan dapat meningkat hingga 20 kali lipat dalam kurun waktu 2020-2035 yakni dari Rp. 1,55 triliun/tahun menjadi Rp. 31,28 triliun/tahun^{xv}.

Analisis Gap Kebijakan

Berbagai permasalahan yang disebutkan sebelumnya menunjukkan pentingnya pengembangan arah kebijakan yang transformatif, proaktif, dan komprehensif. Kebijakan yang transformatif maksudnya adalah kebijakan yang mampu mendorong perubahan dari berbagai praktik yang ada saat ini untuk memperbaikinya dan mengubah pola yang selama ini menurunkan kondisi lingkungan. Kebijakan yang proaktif berarti kebijakan yang berbasis risiko dimana berbagai program maupun arahan kebijakan ditentukan berdasarkan informasi prediksi untuk minimalisasi risiko saat terjadinya kejadian bencana. Lalu kebijakan yang komprehensif adalah kebijakan yang mampu melingkupi berbagai jenis lansekap wilayah, baik itu secara spesifik mampu memberikan arah kebijakan sesuai jenis lansekap wilayahnya serta memastikan koherensi kebijakan antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Kebijakan yang komprehensif ini juga dimaksudkan untuk menekankan integrasi antar berbagai sektor dan level otoritas pemangku kepentingan.



Ilustrasi kebijakan hulu-hilir^{xvi}

(Ilustrasi dari Mercy Corps Indonesia)

Dalam hal mencapai kebijakan sebagaimana yang diharapkan, Mercy Corps Indonesia dalam Policy Brief yang berjudul “Menuju Peradaban Maritim yang Kontemporer: Strategi Transformasi Pengurangan Risiko Banjir Jangka Panjang”, terdapat beberapa hal penting yang bisa dijadikan acuan untuk pengembangan kebijakan banjir yang transformatif, proaktif, dan komprehensif tersebut. Hal utama yang perlu diupayakan adalah adanya komitmen dan ruang kebijakan untuk kolaborasi lintas wilayah untuk pengembangan data risiko, integrasi data, dan integrasi antar berbagai lansekap wilayah. Tidak hanya itu, perubahan paradigma dari bencana sebagai sebuah kejadian menjadi bencana sebagai sebuah proses (*slow onset disaster*) juga diperlukan untuk mencapai perubahan kebijakan tersebut. Sehubungan juga dengan bagaimana banjir dan isu-isu ini sangat erat kaitannya dengan sistem dan pengelolaan sumber daya air, maka perlu untuk mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya air terintegrasi. Pada akhirnya, seluruh upaya yang dilakukan dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sumber daya ekonomi/asset, maupun pengelolaan sumber daya alam juga harus didasarkan pada berbasis pengurangan risiko bencana iklim.

Bagaimanapun, kebijakan yang ada saat ini belum mampu mengakomodasi kompleksitas isu dan pemulihan sistemik yang dibutuhkan oleh Kabupaten Pekalongan. Hal ini diperoleh dari analisis *gap* atau kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan kondisi ideal yang diharapkan^{xvii}. Pengarusutamaan isu banjir dan perubahan iklim dalam kebijakan di Kabupaten Pekalongan terlihat dalam bagaimana pemerintah telah

mengakomodasi isu penurunan permukaan tanah, kenaikan muka air laut, dan banjir rob sebagai isu strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Tabel 1 Analisis *Gap* Kebijakan pada RPJMD 2021-2026

Kebijakan banjir transformatif	Akomodasi dalam RPJMD 2021-2026	Gap Kebijakan
Kolaborasi lintas wilayah untuk pengembangan dan integrasi data risiko bencana	Kolaborasi lintas wilayah sudah dilakukan untuk berbagai bidang seperti transportasi melalui peningkatan konektivitas infrastruktur, perumahan dari segi pendanaan lintas wilayah, persampahan melalui optimalisasi layanan TPST Regional, air dalam hal program SPAM Regional, pariwisata melalui berbagai upaya peningkatan pariwisata berbasis <i>homestay</i> , serta bidang Pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang IPTEK.	Bagaimanapun, masih belum ada program/arrah kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan integrasi data risiko bencana. Salah satu indikasi penyebabnya adalah masih belum adanya arah kebijakan yang jelas terkait dengan satu data.
Inkorporasi penurunan permukaan tanah sebagai bencana dalam kebijakan pembangunan	Penurunan permukaan tanah sudah diakomodasi ke dalam salah satu komponen bencana. Sudah dengan jelas dan berulang kali dipaparkan juga pada dokumen RPJMD ini bagaimana penurunan permukaan tanah adalah penyebab dan menambah kompleks permasalahan banjir di Kabupaten Pekalongan. Sektor kebencanaan ini masuk pada misi menyediakan infrastruktur yang merata.	Bagaimanapun, pengendalian laju penurunan permukaan tanah belum menjadi salah satu indikator pembangunan, dan masih menggunakan luas genangan banjir sebagai salah satu indikatornya. Di sisi lain, arah kebijakan kebencanaan yang masih diturunkan pada lingkup infrastruktur juga berpotensi menafikan aspek pengendalian pembangunan dan konservasi lingkungan dalam konteks

Kebijakan banjir transformatif	Akomodasi dalam RPJMD 2021-2026	Gap Kebijakan
		peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Prioritisasi pengelolaan sumber daya air terintegrasi	RPJMD 2021-2026 sudah cukup baik dalam hal akomodasi konsep pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi atau terpadu, sebagaimana arah dan prinsip penyusunan program sudah mengacu pada prinsip-prinsip <i>Integrated Water Resources Management/IWRM</i>. Termasuk di dalamnya juga komitmen untuk konservasi dan pengelolaan serta pengamanan wilayah Pantai. Tidak hanya itu, komprehensivitas dalam program-program pengelolaan sumber daya air ini juga telah mengakomodasi prinsip partisipasi masyarakat sebagaimana dijelaskan pada salah satu program penyediaan sumber daya air minum yang melandaskan pada partisipasi masyarakat serta menekankan aspek berkelanjutan.	Bagaimanapun, perlu untuk meningkatkan arah dari pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berbasis masyarakat. Hal ini penting mengingat RPJMD 2021-2026 juga menekankan bahwa konservasi sumber daya air juga banyak diarahkan untuk berkaitan dengan konservasi irigasi untuk kepentingan rumah tangga. Tidak hanya itu, perlu dijelaskan juga bagaimana indikator layanan air bersih dengan kualitas baku mutu air yang baik bisa menjadi salah satu indikator dalam ketercapaian program ini. Tidak hanya itu, upaya konservasi sumber daya air juga perlu untuk menjadi bagian dalam penetapan indikator agar memperkuat arah pengelolaan sumber daya air terintegrasi.
Pengelolaan aset terdampak banjir dan genangan	RPJMD 2021-2026 dan implementasi program relokasi untuk masyarakat terdampak genangan pesisir permanen merupakan hal yang sangat baik dalam hal pengelolaan aset terdampak. Terlebih juga program-program hunian untuk masyarakat terdampak ini juga sudah menjadi	Perlu dikembangkan bagaimana kebijakan bagi aset dan property di luar masyarakat berpenghasilan rendah, namun masih belum cukup tinggi kapasitasnya untuk menghadapi permasalahan akibat banjir. Tidak hanya itu, arah kebijakan

Kebijakan banjir transformatif	Akomodasi dalam RPJMD 2021-2026	Gap Kebijakan
	bagian indikator pembangunan. Tidak hanya itu, masyarakat terdampak banjir dan genangan juga dapat masuk pada skema perlindungan sosial yang juga sudah ditetapkan pada RPJMD 2021-2026 tersebut.	perlindungan sosial dari banjir juga perlu dikembangkan agar bisa juga melingkupi perlindungan terhadap asset secara umum.
Kebijakan pembangunan sumber daya manusia dan pengelolaan lingkungan berbasis pengurangan risiko bencana dan/atau peningkatan ketahanan.	Peningkatan ketahanan daerah dan masyarakat sudah menjadi sasaran arah pembangunan, yakni Sasaran 3 RPJMD 2021-2026. Pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan bencana juga sudah menjadi arah dari penanggulangan kemiskinan.	Bagaimanapun, masih perlu dirincikan lebih lanjut bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan masyarakat berketahanan mengingat hal ini belum termasuk pada indikator pembangunan yang ditetapkan. Tidak hanya itu, penetapan indikator yang masih mengacu pada jumlah korban terdampak bencana juga masih perlu dievaluasi mengingat ketahanan adalah hal-hal yang melampaui jumlah korban, namun bagaimana masyarakat terdampak bisa

Rekomendasi: Masukan bagi Draft RPJMD Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan seluruh poin yang sudah dijabarkan sebelumnya, berikut merupakan daftar rekomendasi yang dirangkum dalam bentuk tabel beserta dengan keterangan masukan bagi kerangka programatik rencana pembangunan jangka menengah di Kabupaten Pekalongan:

Rekomendasi untuk transformasi pengelolaan bencana dan adaptasi perubahan iklim

Sektor Pemerintahan (Urusan)	Rekomendasi Program
Lingkungan Hidup & Sumber Daya Air	• Pengukuran D3TLH khususnya terkait bencana alam dan perubahan iklim. • Peningkatan kapasitas institusi dan sosialisasi ke penyuluh dalam hal konservasi lingkungan hidup serta rehabilitasi air dan tanah. • Program konservasi sumber mata air, sepadan sungai, sepadan jurang, dan area kritis (kemiringan tinggi, areal terbuka) di wilayah hulu sebagai bagian mitigasi Krisis iklim dan pengurangan run-off, serta memperbanyak air perkolasi ketika debit air hujan tinggi yang berbasis partisipasi masyarakat dan mendasarkan pada prinsip-prinsip berkelanjutan. • Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa, penyuluh serta masyarakat dalam hal konservasi air (tata kelola mata air) dan tanah (tata kelola penggunaan lahan) pada wilayah hulu ataupun hilir. • Sinergitas Pemda dan Pemdes dalam penyusunan program konservasi di masing-masing desa. • Pembuatan Perdes tentang konservasi tanah dan air baik dalam kawasan lindung maupun budidaya. • Pengembangan Ruang Terbuka Hijau / Ruang Terbuka Biru sebagai bagian dari <i>Nature-based Solutions</i>. • Peningkatan keterpaduan program-program jaringan sumber daya air. • Pemantapan dan pengecekan hasil konservasi air minum serta kualitas air minum yang dikonsumsi rumah tangga secara

Sektor Pemerintahan (Urusan)	Rekomendasi Program
	berkala.
Kebencanaan	• Mendorong integrasi basis data sistem monitoring bencana dan perubahan iklim. • Penyusunan mekanisme penghitungan Kerusakan dan Kerugian (<i>Loss and Damage</i>). • Pengembangan Rencana kontingensi banjir dan bahaya perubahan iklim. • Peningkatan kapasitas institusi BPBD. • Sosialisasi informasi terkait bahaya dan risiko banjir akibat perubahan iklim. • Memanfaatkan hasil kajian KRB (Kajian Resiko Bencana) yang dilakukan oleh BPBD serta kajian <i>Lost & Damage</i> yang dilakukan oleh MCI sebagai salah satu acuan bagi lintas OPD dalam penyusunan program kerja. • Pemantapan keterpaduan dan sinkronisasi antara program perlindungan pesisir dan risiko banjir dengan peningkatan ketahanan bencana. • Integrasi rencana penanggulangan bencana antara pembangunan infrastruktur dengan perlindungan lingkungan berbasis <i>nature-based solutions</i>.

Rekomendasi untuk Pengelolaan Sumberdaya Air Terintegrasi (IWRM)

Sektor Pemerintahan (Urusan)	Rekomendasi Program
Pekerjaan Umum	• Mengembangkan sistem pendukung SPAM Regional Petanglong dengan <i>co-benefit</i> pengendalian debit banjir. • Mendorong rehabilitasi sistem estuari (termasuk kolam retensi). • Mendorong penataan sistem drainase terintegrasi bagi kawasan terdampak banjir dan genangan permanen. • Mendorong aktivasi forum Daerah Aliran Sungai Kupang dan Sengkarang. • Mendorong aktivasi pengembangan sumber daya air minum

Sektor Pemerintahan (Urusan)	Rekomendasi Program
	berkelanjutan berbasis masyarakat. • Pengembangan dam untuk pengendali banjir dan longsor di wilayah hulu.
Tata Ruang	• Pendetailan Peraturan Zonasi dan Perizinan pada Kawasan Khusus (Rawan Banjir). • Pengendalian aktivitas kawasan berisiko banjir dan genangan permanen. • Rehabilitasi/relokasi kawasan terdampak genangan permanen. • Kajian Penguatan fungsi ekologis dari kawasan pesisir. • Normalisasi Sungai. • Penetapan kawasan konservasi berbasis kajian <i>High Conservation Value/High Carbon Stock</i>. • Sinkronisasi keterpaduan program-program pembangunan dan konservasi lingkungan dalam rangka minimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan dan utamanya sumber daya air.
Pertanian dan Ketahanan Pangan	• Penyuluhan pertanian berbasis konservasi dan peningkatan ketahanan wilayah. • Mendorong pembuatan peraturan desa tentang budidaya lahan berkelanjutan sesuai dengan demplot pengelolaan lahan budidaya berkelanjutan.
Lingkungan/ Hidup	• Konservasi lahan kritis pada wilayah hulu dengan vegetasi dan bangunan pencegah degradasi lahan. • Sinkronisasi keterpaduan konservasi lahan kritis dengan konservasi sumber daya air. • Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. • Rehabilitasi Kawasan pesisir dan sepadan pantai dengan menggunakan green belt atau mangrove. • Pengembangan skema insentif-dinsentif untuk upaya-upaya konservasi lingkungan baik itu di dalam wilayah Kabupaten Pekalongan maupun di luar (wilayah-wilayah sekitar Kabupaten Pekalongan).

Rekomendasi untuk pengelolaan aset terdampak banjir dan genangan

Sektor Pemerintahan (Urusan)	Rekomendasi Program
Tata Ruang	• Mengembangkan zona pemanfaatan terbatas bagi wilayah dengan risiko tinggi dan sangat tinggi. • Operasionalisasi Tugas dan Fungsi PPNS bidang Penataan Ruang. • Pengendalian alih fungsi lahan dan pemanfaatan lahan Kehutanan dalam pemanfaatan perekonomian masyarakat. • Rencana penataan ruang zona pesisir yang terintegrasi dengan lintas wilayah administrasi kota kabupaten.(ICZM). • Memasukan hasil kajian resiko bencana dan kajian kerentanan iklim dalam muatan RTRW dan atau RDTR Kabupaten. • Sinkronisasi pemanfaatan ruang dengan risiko bencana serta peningkatan ketahanan masyarakat dan ketahanan wilayah. • Identifikasi zona-zona terdampak banjir dengan pengembangan arah pengelolaan aset.
Pertanahan	• Pemutakhiran dan sosialisasi skema rehabilitasi tanah musnah yang sudah disesuaikan dengan konteks lokal Kabupaten Pekalongan. • Penilaian lahan dan properti terdampak banjir dan genangan permanen dengan prinsip keadilan sosial. • Pengembangan kebijakan agraria restoratif bagi lahan masyarakat terdampak genangan permanen. • Pelibatan notaris dan appraisal dalam percepatan penanganan isu legal tanah musnah. • Pengadaan lahan bagi pengembangan hunian tetap untuk masyarakat terdampak banjir dan genangan permanen.
Permukiman	• Pembangunan <i>shelter</i>/rumah hunian sementara bagi masyarakat terdampak genangan permanen. • Pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak banjir dan genangan permanen.

Sektor Pemerintahan (Urusan)	Rekomendasi Program
	• Pengembangan strategi peningkatan kualitas permukiman terdampak banjir. • Pengembangan strategi permukiman adaptif. • Identifikasi kawasan permukiman dengan risiko bencana tinggi di wilayah hulu. • Sinkronisasi penetapan zona permukiman di wilayah hulu dengan konservasi wilayah hulu.
Kebencanaan	• Pengembangan skema perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat terdampak bencana termasuk mengintegrasikan aspek perlindungan aset bagi masyarakat terdampak banjir.

Rekomendasi untuk pembangunan masyarakat berketahanan

Sektor Pemerintahan (Urusan)	Rekomendasi Program
Kebencanaan	• Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko dan dampak perubahan iklim. • Mendorong Pemdes untuk mengaplikasikan hasil kajian hasil Kawasan Risiko Bencana dan Kerugian dan Kerusakan (<i>Loss and Damage</i>) sebagai acuan dalam penyusunan program mitigasi dan penanggulangan bencana wilayah hulu, tengah, dan hilir. • Peningkatan kapasitas operator alat <i>Climate Weather System</i> di wilayah hulu-hilir dalam mengelola pesan system informasi iklim tersampaikan di tingkat level komunitas secara horizontal untuk meminimal kan resiko bencana akibat cuaca ekstrim • Digitalisasi sistem informasi iklim/cuaca Early Warning System (Climate Information System) sebagai peringatan dini untuk mitigasi bencana. • Menyusun rencana kontingensi untuk ancaman bencana iklim atau hidrometeorologi

Sektor Pemerintahan (Urusan)	Rekomendasi Program
Perekonomian, Perikanan, Pertanian, Pariwisata	• Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Strategi Mata Pencaharian Berketahanan melalui <i>Participatory Land Use Planning</i> pada masyarakat di wilayah hulu/hilir. • Pengembangan Skema Pasar untuk membantu meningkatkan nilai tambah perekonomian sebuah kawasan • Memfasilitasi penguatan entitas kelembagaan bisnis lokal untuk pemasaran dan pengembangan produk. • Penyusunan modul dan menerapkan sistem informasi iklim sebagai penunjang peningkatan kegiatan perekonomian khususnya pada sector pertanian dan perikanan. • Membuat program pengembangan pertanian berbasis konservasi sebagai upaya dalam meningkatkan hasil pertanian dan konservasi lahan di wilayah hulu Kabupaten Pekalongan.(membuat demplot bersama antar SKPD pertanian berbasis konservasi dalam meningkatkan perekonomian tingkat komunitas). • Pengembangan perikanan budidaya dengan tetap memperhatikan aspek estetika dan ramah lingkungan. • Peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal pengelolaan (diversifikasi) produk perikanan menjadi produk yang diminati, memiliki daya saing dan bernilai ekonomi tinggi. • Peningkatan kualitas SDM kepada masyarakat dalam pemanfaatan layanan informasi cuaca dan iklim dalam rangka untuk peningkatan produksi sector pertanian dan perikanan. (programnya pelatihan, dan lain sebagainya). • Sinkronisasi jaminan sosial akibat bencana dengan jaminan sosial secara umum dalam rangka memastikan ketahanan sosial masyarakat terdampak bencana.
Sosial	• Mendorong terbentuknya kampung/desa proklam. • Mendorong terbentuknya desa Tangguh bencana (Destana). • Mendorong pengembangan skema jaminan sosial bagi

Sektor Pemerintahan (Urusan)	Rekomendasi Program
	pelaku bisnis dalam rangka peningkatan ketahanan sosial masyarakat. • Mengembangkan strategi pendidikan sosial yang adaptif serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak bencana banjir. • Sinkronisasi antara program pengembangan masyarakat berketahanan dengan program penanggulangan kemiskinan maupun program pengembangan masyarakat lainnya. • Pengembangan strategi dan skema jaminan sosial bagi kelas menengah yang terdampak banjir maupun genangan pesisir permanen cukup parah dengan keterbatasan kapasitas finansial yang masih belum masuk kategori yang layak mendapatkan bantuan pemerintah.

Referensi

-
- i Koordinasi Bappenas dan Pemkab Pekalongan dilansir dari <https://pekalongankab.go.id/website/berita/2782-fadia-ikhtiar-atasi-3-persoalan-ke-kementerian-ppn-bappenas> (diakses pada 17 Februari 2025)
- ii Penjelasan mengenai program SPAMReg Petanglong yang sudah menjadi salah satu program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha sebagaimana dilansir dari <https://kpbu.kemenkeu.go.id/berita/read/1430/perkembangan-proyek-spam-regional-petanglong-sistem-kaliboyo> (diakses pada 17 Februari 2025).
- iii Informasi ini diperoleh dari Focus Group Discussion bersama berbagai instansi dan Mercy Corps Indonesia pada tanggal 29 Mei 2024.
- iv Relokasi ke Desa Tratebang menjadi salah satu program yang inovatif untuk pengembangan kebijakan alternatif untuk masyarakat terdampak banjir pesisir sebagaimana dilansir dari <https://pekalongankab.go.id/website/berita/2845-bupati-warga-simonet-akan-direlokasi-ke-desa-tratebang> yang diakses pada 17 Februari 2025.
- v Berita ini diambil dari BBC yang diperbaharui tanggal 23 Januari 2025 <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy4men3p7m7o>
- vi Banjir di wilayah pesisir ini terjadi di waktu yang bersamaan dengan banjir di wilayah hulu, sebagaimana dilaporkan pada tautan berikut: <https://rasikapekalongan.com/pan-kabupaten-pekalongan-bagikan-logistik-dan-makanan-siap-santap-di-wiradesa-dan-wonokerto/>
- vii Disampaikan oleh Ade Soekadis pada Policy Dialogue “Masa Depan Pekalongan: Konsekuensi dari Setiap Aksi” yang dilaksanakan pada 21 September 2022. Dilansir dari <https://dkp.jatengprov.go.id/berita/detail/kegiatan-policy-dialogue--masa-depan-pekalongan--konsekuensi-dari-setiap-kebijakan-dan-aksi/>
- viii Pamungkas, A. F., Nugroho, W. H., & Yudiana, B. (2024). Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Pesisir Pekalongan melalui Mitigasi Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK, 20(2), 81-96. <https://doi.org/10.33658/jl.v20i2.410>
- ix Mercy Corps Indonesia. (2020). Policy Brief Bangkit dari Banjir di Pekalongan: Kebutuhan Kebijakan Transformatif.
- x *Ibid.*

-
- ^{xi} Deltares. (2019). *Risk Assessment North Coast Java*. hlm 7.
- ^{xii} Syam, D. A., Wengi, K. R. L., & Gandapurnama, A. (2021). Climate Risk and Impact Assessment of Pekalongan, Indonesia (Technical Working Report). Mercy Corps Indonesia.
- ^{xiii} *Ibid.*
- ^{xiv} *Ibid.*
- ^{xv} *Ibid.*
- ^{xvi} Mercy Corps Indonesia. (2024). Policy Brief Menuju Peradaban Maritim yang Kontemporer: Strategi Transformasi Pengurangan Risiko Banjir Jangka Panjang
- ^{xvii} Proses analisis dilakukan pada bulan Februari 2025 dengan mengacu pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026